

**Interupsi Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke – 14
Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022
Selasa, 8 Februari 2022**

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.39 WIB)

Nama	Pernyataan	Keterangan
<p>K.H. BUKHORI,Lc.,M.A. A-440/F-PKS/Dapil: Jawa-Tengah I</p>	<p>Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan. Bukhori A-440, saya kira itu sesuai dengan Tatib Pimpinan, jadi Pandangan Fraksi itu harus dibacakan di Pasal 256 ayat (6) jelas, bahwa Pandangan Fraksi itu dibacakan masing-masing mendapatkan porsi waktu, karena itu kami mengharap usulan PKS harus diberikan kesempatan waktu masing-masing.</p> <p>Terima kasih.</p>	
<p>LULUK NUR HAMIDAH,M.Si.M.PA A-20/F-PKB/Dapil: Jawa Tengah IV</p>	<p>Ijin Pimpinan untuk interupsi abis ini, ya. Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Bapak/Ibu Anggota dan juga Hadirin yang berbahagia. Ijinkan saya Luluk Nur Hamidah dari F-PKB Nomor A-20 Ja-Teng IV, dan sekaligus Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Pimpinan yang terhormat Bahwa setiap tahun Komite CEDAW atau Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan melakukan pertemuan di <i>New York</i> dan dihadiri oleh Wakil Pemerintah diseluruh dunia termasuk Indonesia, dimata Komite ini memberikan penilaian terhadap upaya dari Negara atau Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan juga penghapusan diskriminasi khususnya terhadap perempuan dan khususnya lagi adalah dibidang politik. Indonesia mendapatkan catatan karena sampai saat ini keterwakilan perempuan di Parlemen belum memenuhi minimal angka kritis yang</p>	

Nama	Pernyataan	Keterangan
	<p>seharusnya bisa diwujudkan yaitu 30% sementara disisi lain ada dorongan dan juga komitmen dari komunitas Internasional dan itu juga menjadi kesepakatan bagi Pemerintah Indonesia mulai di tahun 2030 nanti Indonesia sebagaimana Negara yang lain didorong untuk mewujudkan <i>plan activity</i> atau keterwakilan 50% di Parlemen. Pimpinan membangun demokrasi sejati dari keberadaban mustahil dilakukan tanpa memperjuangkan rumah politik yang setara yang mengakomodasi hak seluruh warga Negara baik laki-laki ataupun perempuan khususnya juga mereka yang menjadi kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, ibu hamil, menyusui, perempuan Pekerja Rumah Tangga dan lain sebagainya. Dibutuhkan <i>good will</i> atau kemauan politik, dibutuhkan kemauan baik yang sangat kuat untuk bisa mengeleminasi setiap bentuk diskriminasi yang menyebabkan keterwakilan perempuan di Parlemen itu bisa ditingkatkan. Bank Dunia atau WBF juga memberikan laporan bahwa Indonesia sampai hari ini rangkingnya ke-7 dibandingkan dengan Negara-negara di Asia Tenggara bahkan posisi kita dibawah Timor Leste dan posisi Indonesia bahkan jauh dibandingkan dengan Ruanda yang bisa mencapai keterwakilan perempuan hingga 40%.</p> <p>Oleh karena itu <i>design</i> besar peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen selain pendidikan politik dan pemuatan peran Partai Politik maka sudah seharusnya kita memberikan atensi pada penyelenggaraan pada Pemilu itu sendiri, dimana prasyarat adanya presentasi minimal 30% pada penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu, disemua tingkatan juga merupakan sebuah keniscayaan, mengapa ini penting untuk kita dorong adanya keterwakilan minimal 30% sebagai penyelenggaraa Pengulu setidaknya ada lima alasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan. 2. Akses yang setara untuk melakukan partisipasi politik. 3. Peluang yang setara bagi perempuan untuk mempengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan 	

Nama	Pernyataan	Keterangan
	<p>4. Mendorong lahirnya kebijakan politik yang berkualitas, mendorong kebijakan publik yang bermutu, inklusif dan juga ada <i>gender</i>.</p> <p>5. Pemenuhan hak konstitusional dan juga percepatan tujuan SPJIS.</p> <p>Oleh karena itu saya mohon Pimpinan DPR RI dan Bapak/Ibu sekalian memberikan atensi khusus pada seleksi calon penyelenggara Pemilu agar keterwakilan perempuan minimal 30% di KPU dan Bawaslu tetap kita jaga sebagai wujud <i>political will</i> kita pada demokrasi yang setara berkeadilan demi mewujudkan kemaslahatan untuk Republik ini.</p> <p>Terima kasih. <i>Wallahumuwafiq illaaqwamittariq</i> <i>Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i></p>	

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.36 WIB)

Jakarta, 8 Februari 2022
Kepala Bagian Persidangan Paripurna,



Rachmi Suprihartanti Septiningtiyas, S.H., M.H.
NIP. 196709251994032003